



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI
PAJAK, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta
Timur Tahun 2016)**

Yusnindar
Akademi Akuntansi Jayabaya Jakarta
(Naskah diterima: 10 April 2018, disetujui: 30 April 2018)

Abstract

The purpose of this study aims to analyze and find empirical evidence regarding the effect of taxpayer knowledge, the firmness of tax sanctions and tax amnesty on individual taxpayer compliance at the East Jakarta tax office. This type of research is a causal research that will test the hypothesis about the effect of one or more independent variables on the dependent variable. The population in this study were all individual taxpayers registered at the Tax Service Office (KPP) in the work environment of the East Jakarta Directorate General of Taxes, which in the reporting of the tax notification (SPT) was underpayment. The sample selection used purposive sampling method with a total of one hundred (100) respondents. In analyzing the data using simple linear regression analysis method which includes validity test, reliability test, normality test, and to test the hypothesis expressed in this study using multiple linear regression test and t test. The results showed that partially tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance, the firmness of tax sanctions has a positive and significant effect on taxpayer compliance, Tax Amnesty has a positive and significant effect on taxpayer compliance and simultaneously (together) Tax knowledge, Firmness of tax sanctions, Tax Amnesty has a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Knowledge of Taxation, Firmness of Tax Sanctions, Tax Amnesty, Taxpayer Compliance.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kanwil pajak Jakarta Timur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal yang akan menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam lingkungan kerja kantor wilayah Ditjen Pajak Jakarta Timur yang dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajaknya adalah kurang bayar. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak seratus (100) responden. Dalam menganalisis data menggunakan metode analisis regresi linier sederhana yang memuat uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan untuk menguji hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier

berganda dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Tax Amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan secara simultan (bersama-sama) Pengetahuan perpajakan, Ketegasan sanksi pajak, Tax Amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak.

I. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak merupakan institusi yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Setiap tahun, target penerimaan negara dari sektor perpajakan selalu meningkat. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah bahwa kedepannya sektor perpajakan dapat membiayai seluruh pembiayaan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tabel 1.1
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Realisasi Pendapatan Negara (dalam triliun rupiah)	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi (%)
2011	875	850	873	102,76
2012	986	1.016	979	96,41
2013	1.080	1.148	1.077	93,81
2014	1.150	1.246	1.146	92,04
2015	1.250	1.489	1.240	83,29
2016	1.784	1.546	1.539	99,54

Sumber: Website Resmi Kementerian Keuangan (2017)

Tabel di atas menunjukkan bahwa perpajakan merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar untuk membiayai anggaran belanja negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak itu penting. Sedangkan dari tahun ke tahun terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak. Hal tersebut juga menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, untuk itu diperlukan usaha keras pemerintah Indonesia agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan atau kondisi dimana wajib pajak dalam hal kesadarannya dituntut untuk patuh dan melaksanakan Undang-Undang perpajakan yang berlaku (Dyah dkk, 2012). Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan

kewajiban perpajakannya sangat bergantung pada persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap pajak, yang mana diketahui bahwa terjadinya banyak penyelewengan dan penyimpangan pada instansi perpajakan membuat masyarakat semakin tidak menyadari

manfaat pajak dan mengurangi niat dan keinginan untuk membayar pajak.

II. KAJIAN TEORI

Penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat diringkas dalam tabel 2.1 berikut ini:

Daftar Penelitian Sebelumnya (Tabel.2.1)

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Media Publikasi	Hasil Penelitian
1	Hardiningsih (2011)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak	Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No. 1 Nopember 2011, Hal: 126 - 142	1) Kesadaran membayar pajak dan kualitas layanan berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak; 2) Pengetahuan peraturan perpajakan, Pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
2	Asbar (2014)	Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Senapelan Pekanbaru:	Jurnal JOM FEKON Vol. 1 No. 2 Oktober 2014	1) Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi; 2) Kesadaran pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
3	Caroko, dkk (2015)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak”.	Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 1 No. 1 Januari 2015	Variabel pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak mempengaruhi motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.
4	Adesina dan Uyioghosa (2016)	<i>Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria</i>	<i>Jurnal iBusiness</i> Vol. 08 No.01(2016)	Pengetahuan pajak dan sanksi pajak memiliki dampak positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
5	Hantoyo, dkk. (2016)	Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegay)	Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 9 No. 1 2016	Secara parsial variabel penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan dan variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan variabel penghindaran pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel yang paling dominan adalah variabel Sanksi perpajakan.
6	Rusmadi (2017)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Jurnal Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 2, No 3 Maret 2017	<i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Pajak sama-sama memiliki peran dalam peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Media Publikasi	Hasil Penelitian
			ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398	
7	Savitri dan Nuraeni (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun	<i>EQUILIBRIUM</i> , Jurnal Volume 5, Nomor 1, Januari 2017	Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber : Data yang diolah (2017)

III. METODE PENELITIAN

Populasi penelitian

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan atau individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Beni dan Nurjaman, 2013). Populasi mengacu pada keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Prasetyo dan Jannah, 2012).

Agar supaya tidak meluas penelitian ini maka, peneliti membatasi Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Timur dengan batasan pelapor SPT yang kurang bayar saja. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Timur yang terdiri dari sembilan (9) KPP terdaftar terdapat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang di dalam pelaporan SPT nya adalah kurang bayar sebanyak 328 Wajib Pajak. Jumlah tersebut

hanya berkisar 0,12% saja dari total jumlah WP orang pribadi yang terdaftar sebesar 271.151 WP, sebagian besar dalam pelaporan SPT nya adalah nihil berkisar 99,83% dan sisanya adalah yang di dalam SPT nya lapor lebih bayar berkisar 0,048%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kanwil DJP Jakarta Timur adalah pegawai yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau memiliki lebih dari satu pekerjaan dimana pajak penghasilannya sudah dipotong dan dibayarkan melalui instansi masing-masing wajib pajak bekerja. Adapun Sembilan KPP yang menjadi pengawasan Kanwil DJP Jakarta Timur adalah KPP Madya Jakarta Timur, KPP Pratama Jakarta Matraman, KPP Pratama Jakarta Jatinegara, KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung, KPP Pratama Jakarta Kramatjati, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, dan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Sampel penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang didalam pelaporan SPT nya adalah kurang bayar yang menjadi target dan merupakan subjek pajak dalam negeri. Yang dimaksud dengan subyek pajak orang pribadi dalam negeri menurut Undang-Undang (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia;
- Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Untuk menentukan berapa minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi diketahui dapat menggunakan rumus Slovin (Riduwan dan Kuncoro, 2008), yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Dimana:

- n = Ukuran Sampel
- N = Ukuran Populasi
- e = Kelonggaran Ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir.

Data yang peneliti dapatkan dari Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Timur, peneliti memperoleh jumlah wajib pajak orang pribadi kurang bayar sesuai kriteria di atas sebanyak 328 wajib pajak.

Dari jumlah populasi yang telah diketahui dengan jelas, maka penghitungan pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

$$n = \frac{328}{1 + 328(5\%)^2}$$

$$n = \frac{328}{1,82}$$

n = 180,22 dibulatkan menjadi 180

Berdasarkan perhitungan tersebut jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 180 wajib pajak diambil secara merata di tiap-tiap KPP yang masuk dalam lingkungan Kerja Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Timur.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang dikirim, sedangkan sumber data berasal dari jawaban wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Timur.

Metode Analisis

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan deskripsi tentang karakter variabel penelitian dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan angka modus, kisaran skor dan standar deviasi.

Uji Kualitas Data

Menurut Hair et. al (1996, dalam Sandjojo, 2011), kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas. Pengujian tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Ada dua jenis uji kualitas data yang dilakukan dalam penelitian ini:

Uji validitas konstruk (Construct validity)

Uji validitas konstruk (Construct validity) digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner dalam mengukur suatu konstruk. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi Pearson's Product Moment. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{[n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2][n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2]}}$$

Keterangan:

- rx_y = koefisien korelasi
- n = jumlah responden uji coba
- X = skor tiap item
- Y = skor seluruh item responden uji coba

Dari perhitungan tersebut menghasilkan butir-butir yang valid dan yang tidak valid, dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel) maka butir instrumen tersebut valid, tetapi sebaliknya bila r hitung lebih kecil dari r tabel (r hitung < r tabel) maka instrumen tersebut tidak valid dan tidak dipergunakan dalam penelitian (Sandjojo, 2011). Kemudian, untuk menguji signifikan hasil korelasi kita gunakan uji-t. Adapun kriteria untuk menentukan signifikan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Jika thitung > ttabel, maka dapat kita simpulkan bahwa butir item tersebut valid. Rumus mencari thitung yang digunakan adalah :

$$t_{hitung} = \frac{r_{xy} \sqrt{(n - 2)}}{\sqrt{(1 - r_{xy}^2)}}$$

Uji konsistensi internal (reliabilitas)

Uji konsistensi internal (reliabilitas) ditentukan dengan koefisien Cronbach Alpha. Pengujian ini menentukan konsistensi jawaban responden atas suatu instrumen penelitian. Nunnally (1969 dalam Sandjojo, 2011) men-

syaratkan suatu instrumen yang reliabel jika memiliki koefisien Cronbach Alpha di atas 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari:

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal, mendekati normal atau tidak (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data pada penelitian ini digunakan uji Lilliefors. Ketentuan dalam uji Lilliefors adalah bila statistik $L_{hitung} < L_{tabel}$ ($\alpha = 0.05$), maka data galat berdistribusi normal. Tetapi apabila $L_{hitung} > L_{tabel}$ ($\alpha = 0.05$), maka data tidak berdistribusi normal.

Uji Hipotesis

Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode regresi berganda, yaitu regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen, yang bertujuan untuk memenuhi ekspektasi peneliti mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon_1 \quad (1)$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Ketegasan Sanksi Pajak

X3 = Tax Amnesty

α = konstanta atau harga Y bila X = 0

β = angka atau arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi (α) 0,05 atau 5%. Analisis regresi berganda ini dilakukan dengan bantuan program SPSS (Statistical Package For Social Sciences) Release 22.0 for Windows sehingga akan dapat diperoleh nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t yang digunakan pada pengujian hipotesis.

Koefisien Determinasi.

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, sedang nilai yang mendekati satu berarti nilai variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Statistik t (t Test)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, atau: $H_0 : \beta_i = 0$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: $H_A : \beta_i \neq 0$. Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut: Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

IV. HASIL PENELITIAN

Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan sebanyak 180 kuesioner kepada responden, yaitu para wajib pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Jakarta Timur. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 133 eksemplar dengan rincian pengembalian yaitu, diterima sampai batas akhir sebanyak 111 kuesioner, sedangkan 22 kuesioner diterima setelah batas akhir. Sebanyak 100 jawaban responden yang dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut, 33 jawaban responden tidak dapat diikuti sertakan

karena tidak lengkap dalam pengisian data kuisisioner (tidak diisi dengan baik). Dengan demikian tingkat pengembalian (respon rate) dari kuisisioner yang disebarakan sebesar 73,9%. Ringkasan pengiriman dan pengembalian kuisisioner ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Rincian Pengiriman dan Penerimaan Kuisisioner

	Jumlah	Prosentase
Total kuisisioner yang dikirim	180	100
Kuisisioner yang tidak kembali	47	26,1
Kuisisioner yang kembali	133	73,9
Jumlah kuisisioner yang kembali sampai batas waktu	111	61,7
Jumlah kuisisioner yang kembali setelah batas waktu	22	12,2
Kuisisioner yang pengisiannya tidak lengkap	33	18,3
Kuisisioner yang dipakai dalam pengolahan data	100	55,6

Sumber: Data primer yang diolah (2017)

Deskripsi Data Penelitian

Analisis deskriptif dihitung berdasarkan persentase jawaban responden terhadap pertanyaan penelitian dengan menggunakan nilai rata-rata (mean) dari setiap indikator yang diajukan untuk menggambarkan persepsi seluruh responden. Berdasarkan nilai rata-rata (mean) tersebut, selanjutnya dilakukan interpretasi persepsi responden dengan menggunakan rentang angka yaitu, 1–1,60 = sangat rendah, 1,61–2,60 = rendah, 2,61–3,60 = sedang, 3,61–4,60 = tinggi dan 4,61 – 5,00 = sangat tinggi.

Pengetahuan Perpajakan

Tabel 4.9.1 Deskripsi Variabel Pengetahuan Perpajakan

No	Dimensi	Skor Rata-Rata
1	Penyuluhan	3,69
2	Peraturan	3,71
	Total	7,40
	Rata-rata	3,70

Sumber : Data primer yang diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4.9.1 di atas yang merupakan hasil pengolahan data primer, skor angka hasil dari jawaban kuisisioner responden untuk pengetahuan perpajakan menunjukkan skor rata-rata sebesar 3,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi jawaban responden pada variabel pengetahuan perpajakan dalam kategori tinggi, karena berada pada rentang nilai antara 3,6 – 4,60. Dari angka rata-rata tersebut dapat diartikan juga bahwa Wajib Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Timur memiliki pengetahuan perpajakan yang baik.

Ketegasan Sanksi Pajak

Tabel 4.9.2 Deskripsi Variabel Ketegasan Sanksi Pajak

No	Dimensi	Skor Rata-Rata
1	Sanksi Pajak	3,83
2	Penegakan Hukum	3,90
3	Sosialisasi Sanksi Pajak	2,62
	Total	10,35
	Rata-rata	3,65

Sumber : Data primer yang diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4.9.2 di atas yang merupakan hasil pengolahan data primer, skor angka hasil dari jawaban kuisioner responden untuk Ketegasan Sanksi Pajak menunjukkan skor rata-rata sebesar 3,65. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi jawaban responden pada variabel ketegasan sanksi pajak dalam kategori tinggi, karena berada pada rentang nilai antara 3,61 – 4,60. Dari angka rata-rata tersebut dapat diartikan juga bahwa dengan ketegasan sanksi pajak secara adil dan tegas akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Tax Amnesty

Tabel 4.9.3 Deskripsi Variabel Tax Amnesty

No	Dimensi	Skor Rata-Rata
1	Pengetahuan dan Pemahaman	3,61
2	Kesadaran dan Motivasi	3,58
3	Pemanfaatan	3,88
	Total	11,06
	Rata-rata	3,73

Sumber : Data primer yang diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4.9.3 di atas yang merupakan hasil pengolahan data primer, skor angka hasil dari jawaban kuisioner responden untuk Tax Amnesty menunjukkan skor rata-rata sebesar 3,73. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi jawaban responden pada variabel Tax Amnesty dalam kategori tinggi, karena berada pada rentang nilai antara 3,61 – 4,60. Dari angka rata-rata terse-

but dapat diartikan juga bahwa dengan adanya Tax Amnesty yang merupakan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan berdampak pada pendapatan negara dari sektor pajak.

Kepatuhan wajib pajak

Tabel 4.9.4 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Dimensi	Skor Rata-Rata
1	Pemahaman	3,56
2	Administrasi	3,85
3	Kesadaran	3,70
	Total	11,11
	Rata-rata	3,70

Sumber : Data primer yang diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4.9.4 di atas yang merupakan hasil pengolahan data primer, skor angka hasil dari jawaban kuisioner responden untuk Ketegasan Sanksi Pajak menunjukkan skor rata-rata sebesar 3,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi jawaban responden pada variabel ketegasan sanksi pajak dalam kategori tinggi, karena berada pada rentang nilai antara 3,61 – 4,60. Dari angka rata-rata tersebut dapat diartikan juga bahwa kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jakarta Timur cukup baik.

Uji Kualitas Data

Sebelum dilaksanakan analisis lebih lanjut terhadap 100 data yang diobservasi akan

dilakukan uji validitas, dan uji realibilitas terlebih dahulu.

Hasil Uji Validitas Konstruk (*Construct Validity*)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner dalam mengukur suatu kontrak. Dan sekaligus memperkuat hasil perhitungan sebelumnya bahwa semua variabel yang diukur dengan menggunakan skala likert dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya.

Instrumen pengetahuan perpajakan berupa kuesioner yang terdiri dari 7 (tujuh) butir pertanyaan. Dengan demikian rentang skor teoretik antara 7 sampai 35. Uji validasi instrumen pengetahuan perpajakan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Microsoft Excel*. Berdasarkan hasil perhitungan, validasi instrumen pengetahuan perpajakan dengan $n = 100$, diperoleh r_{hitung} yang kemudian dibandingkan dengan r_{tabel} pada taraf signifikan 5 % diperoleh $r_{tabel} = 0,197$. Selanjutnya dicari t_{hitung} guna dibandingkan dengan t_{tabel} untuk $\alpha = 0.05$ dan $dk = 100-2 = 98$, dengan uji dua pihak diperoleh $t_{tabel} = 1,984$. Dari 7 (tujuh) butir pertanyaan menunjukkan butir-butir pertanyaan yang valid. Dengan demikian semuanya dapat digunakan sebagai alat pengambilan data penelitian.

Instrumen Ketegasan sanksi pajak berupa kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) butir pertanyaan. Dengan demikian rentang skor teoretik antara 6 sampai 30. Uji validasi instrumen Ketegasan sanksi pajak dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Microsoft Excel*. Berdasarkan hasil perhitungan, validasi instrumen Ketegasan sanksi pajak dengan $n = 100$, diperoleh r_{hitung} yang kemudian dibandingkan dengan r_{tabel} pada taraf signifikan 5 % diperoleh $r_{tabel} = 0,197$. Selanjutnya dicari t_{hitung} guna dibandingkan dengan t_{tabel} untuk $\alpha = 0.05$ dan $dk = 100-2 = 98$, dengan uji dua pihak diperoleh $t_{tabel} = 1,984$. Dari 6 (enam) butir pertanyaan menunjukkan butir-butir pertanyaan yang valid. Dengan demikian semuanya dapat digunakan sebagai alat pengambilan data penelitian.

Instrumen *tax amnesty* berupa kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) butir pertanyaan. Dengan demikian rentang skor teoretik antara 6 sampai 30. Uji validasi instrumen *tax amnesty* dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Microsoft Excel*. Berdasarkan hasil perhitungan, validasi instrumen *tax amnesty* dengan $n = 100$, diperoleh r_{hitung} yang kemudian dibandingkan dengan r_{tabel} pada taraf signifikan 5 % diperoleh $r_{tabel} = 0,197$. Selanjutnya dicari t_{hitung} guna dibandingkan dengan t_{tabel} untuk α

= 0.05 dan $dk = 100 - 2 = 98$, dengan uji dua pihak diperoleh $t_{tabel} = 1,984$. Dari 5 (lima) butir pertanyaan menunjukkan butir-butir pertanyaan yang valid. Dengan demikian semuanya dapat digunakan sebagai alat pengambilan data penelitian.

Instrumen kepatuhan wajib pajak berupa kuesioner yang terdiri dari 5 (lima) butir pertanyaan. Dengan demikian rentang skor teoretik antara 5 sampai 25. Uji validasi instrumen kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Microsoft Excel*. Berdasarkan hasil perhitungan, validasi instrumen kepatuhan wajib pajak dengan $n = 100$, diperoleh r_{hitung} yang kemudian dibandingkan dengan r_{tabel} pada taraf signifikan 5 % diperoleh $r_{tabel} = 0,197$. Selanjutnya dicari t_{hitung} guna dibandingkan dengan t_{tabel} untuk $\alpha = 0.05$ dan $dk = 100 - 2 = 98$, dengan uji dua pihak diperoleh $t_{tabel} = 1,984$. Dari 5 (lima) butir pertanyaan menunjukkan butir-butir pertanyaan yang valid. Dengan demikian semuanya dapat digunakan sebagai alat pengambilan data penelitian. Hasil Uji Validasi dari masing-masing variabel dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Validitas

Variabel	No. Item	Nilai Korelasi	Status
Pengetahuan Perpajakan	Q1	0,603	Valid
	Q2	0,547	Valid
	Q3	0,727	Valid
	Q4	0,877	Valid
	Q5	0,572	Valid
	Q6	0,680	Valid
	Q7	0,561	Valid
Ketegasan Sanksi Pajak	Q8	0,790	Valid
	Q9	0,746	Valid
	Q10	0,832	Valid
	Q11	0,760	Valid
	Q12	0,643	Valid
	Q13	0,269	Valid
Tax Amnesty	Q14	0,841	Valid
	Q15	0,779	Valid
	Q16	0,849	Valid
	Q17	0,713	Valid
	Q18	0,689	Valid
	Q19	0,304	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Q20	0,427	Valid
	Q21	0,774	Valid
	Q22	0,851	Valid
	Q23	0,691	Valid
	Q24	0,737	Valid

Sumber: Data pimer yang diolah (2017)

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan mengacu pada *Cronbach Alpha* 0,60. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa seluruh instrumen dari variabel yang diuji memiliki Cronbach alpha di atas 0.60, jadi hasil pengujian cukup memuaskan karena semua instrumen memiliki tingkat reliabilitas (keandalan) yang tinggi, sehingga dapat dipakai untuk pengolahan data selanjutnya.

Dengan bantuan perangkat lunak komputer *Microsoft Excel*, perhitungan reliabilitas instrumen pengetahuan perpajakan sebanyak 7 (tujuh) butir pertanyaan, diperoleh hasil $r_{11} = 0,832$. Untuk dapat mengetahui reliabilitas instrumen, perlu dicari nilai tabel *r Product Moment* dengan derajat kebebasan, $dk=N-1=100-1=99$, serta signifikansi 5%, diperoleh $r_{tabel} = 0,197$. Jika $r_{11} > r_{tabel}$ berarti reliabel, dan sebaliknya jika $r_{11} < r_{tabel}$ berarti tidak reliabel. Karena $r_{11} = 0,832 > r_{tabel} = 0,197$, maka instrumen pengetahuan perpajakan adalah reliabel.

Untuk perhitungan reliabilitas instrumen ketegasan sanksi pajak sebanyak 6 (enam) butir pertanyaan, diperoleh hasil $r_{11} = 0,806$. Untuk dapat mengetahui reliabilitas instrumen, perlu dicari nilai tabel *r Product Moment* dengan derajat kebebasan, $dk=N-1=100-1=99$, serta signifikansi 5%, diperoleh $r_{tabel} = 0,197$. Jika $r_{11} > r_{tabel}$ berarti reliabel, dan sebaliknya jika $r_{11} < r_{tabel}$ berarti tidak reliabel. Karena $r_{11} = 0,806 > r_{tabel} = 0,197$, maka instrumen ketegasan sanksi pajak adalah reliabel.

Dan untuk perhitungan reliabilitas instrumen *Tax Amnesty* sebanyak 6 (enam) butir pertanyaan, diperoleh hasil $r_{11} = 0,835$. Untuk dapat mengetahui reliabilitas instrumen, perlu dicari nilai tabel *r Product Moment* dengan

derajat kebebasan, $dk=N-1=100-1=99$, serta signifikansi 5%, diperoleh $r_{tabel} = 0,197$. Jika $r_{11} > r_{tabel}$ berarti reliabel, dan sebaliknya jika $r_{11} < r_{tabel}$ berarti tidak reliabel. Karena $r_{11} = 0,835 > r_{tabel} = 0,197$, maka instrumen *Tax Amnesty* adalah reliabel.

Sedangkan untuk perhitungan reliabilitas instrumen kepatuhan wajib pajak sebanyak 5 (lima) butir pertanyaan, diperoleh hasil $r_{11} = 0,633$. Untuk dapat mengetahui reliabilitas instrumen, perlu dicari nilai tabel *r Product Moment* dengan derajat kebebasan, $dk=N-1=100-1=99$, serta signifikansi 5%, diperoleh $r_{tabel} = 0,197$. Jika $r_{11} > r_{tabel}$ berarti reliabel, dan sebaliknya jika $r_{11} < r_{tabel}$ berarti tidak reliabel. Karena $r_{11} = 0,633 > r_{tabel} = 0,197$, maka instrumen kepatuhan wajib pajak adalah reliabel.

Hasil Uji Reliabilitas dari masing-masing variabel dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Reliabilitas

No	Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Jumlah Instrument
1	Pengetahuan Perpajakan	0,832	7
2	Ketegasan Sanksi Pajak	0,806	6
3	Tax Amnesty	0,835	6
4	Kepatuhan wajib pajak	0,633	5

Sumber: Data pimer yang diolah

Uji Asumsi Klasik

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari:

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dengan menggunakan uji *Lilliefors*. Ketentuan dalam uji galat adalah bila statistik $L_{hitung} < L_{tabel}$ ($\alpha = 0.05$), maka data galat berdistribusi normal. Tetapi apabila $L_{hitung} > L_{tabel}$ ($\alpha = 0.05$), maka data tidak berdistribusi normal.

a. Uji normalitas kepatuhan wajib pajak atas pengetahuan perpajakan (Y atas X₁)

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai L_{hitung} adalah -0,0945, nilai tersebut ternyata lebih kecil dari pada nilai L_{tabel} ($n = 100$ dan $\alpha = 0.05$) adalah 0,0886, dengan demikian dapat dikemukakan bahwa distribusi galat kepatuhan wajib pajak atas pengetahuan perpajakan berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

b. Uji normalitas kepatuhan wajib pajak atas ketegasan sanksi pajak (Y atas X₂)

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai L_{hitung} adalah -0,0974. nilai tersebut ternyata lebih kecil dari pada nilai L_{tabel} ($n = 100$ dan $\alpha = 0.05$) adalah 0,0886. dengan demikian

dapat dikemukakan bahwa distribusi kepatuhan wajib pajak atas ketegasan sanksi pajak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

c. Uji normalitas kepatuhan wajib pajak atas tax amnesty (Y atas X₃)

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai L_{hitung} adalah -0,0875. nilai tersebut ternyata lebih kecil dari pada nilai L_{tabel} ($n = 100$ dan $\alpha = 0.05$) adalah 0,0886. dengan demikian dapat dikemukakan bahwa distribusi galat kepatuhan wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Dengan demikian secara keseluruhan hasil perhitungan uji normalitas dengan menggunakan uji *Lilliefors* dapat dilihat pada rangkuman di tabel 4.12.

Tabel 4.13 Rangkuman Uji Normalitas

No	Taksiran	n	L Hitung	L Tabel		Keput usan
				$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.01$	
1	Y atas X ₁	100	-0,0945	0,0886	0,1031	Normal
2	Y atas X ₂	100	-0,0974	0,0886	0,1031	Normal
3	Y atas X ₃	100	-0,0875	0,0886	0,1031	Normal

Sumber: Data pimer yang diolah

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel

bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Gozali, 2011). Deteksi terhadap ada tidaknya multikolenieritas dalam penelitian ini dengan (1) menganalisis matrik korelasi antar variabel bebas, jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas, (2) Melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor*, suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolenieritas apabila mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau 10% dan nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10. Hasil perhitungan *tolerance* sesuai Tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Pajak	0,978	1,023
Ketegasan Sanksi Pajak	0,333	3,005
Tax Amnesty	0,335	2,986

Sumber: Data pimer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 10%; semua nilai *tolerance*nya lebih dari 10%; yang berarti tidak ada korelasi antar variabel. Hasil perhitungan nilai *variance inflation factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada variabel

bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10; nilai *variance inflation factor* (VIF) semuanya kurang dari 10. Kesimpulannya adalah tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi berdasarkan uji nilai *tolerance*.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson (DW). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.14:

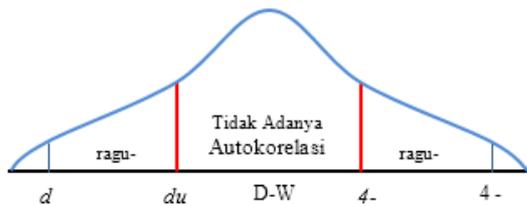
Tabel 4.15 Hasil uji autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,906 ^a	0,820	0,814	1,422	2,087

Sumber: Data pimer yang diolah

Berdasarkan output SPSS, didapat nilai statistik Durbin Watson sebesar 2,087. Sedangkan dari tabel Durbin Watson dengan $n = 100$ dan $k = 3$ maka diperoleh d_{tabel} yaitu dl (batas luar) = 1,613 dan du (batas dalam) = 1,736 dengan taraf signifikansi 5%, $4-du = 2,264$; dan $4-dl = 2,387$; maka dari perhitungan disimpulkan bahwa DW-test terletak

pada daerah uji. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.8 sebagai berikut:



Gambar Uji Durbin Watson

Sesuai dengan Gambar 4.8 tersebut menunjukkan bahwa Durbin-Watson berada di daerah *tidak adanya autokorelasi*. Mengacu pada Ghazali (2011), model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi karena nilai Durbin Watsonnya berada di antara du dan $4-du$.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Priyatno, 2009). Deteksi adanya heterokedastisitas adalah :

- a. Nilai probabilitas $> 0,05$ berarti bebas dari heterokedastisitas.
- b. Nilai probabilitas $< 0,05$ berarti terkena heterokedastisitas.

Hasil pengujian dengan menggunakan uji *rank spearman* dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut:

Tabel Hasil Uji Heterokedastisitas

			X1	X2	X3
Spearman's rho	Abres	Correlation Coefficient	-0,002	-0,076	-0,082
		Sig. (2-tailed)	0,981	0,453	0,420
		N	100	100	100

Sumber: Data pimer yang diolah

Hasil uji *rank spearman* pada tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas signifikansi untuk variabel pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* sebesar 0.981, 0,453 dan 0.420. Karena nilai probabilitas signifikan untuk variabel pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data bebas dari heterokedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Analisis regresi berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Dengan menggunakan metode regresi linier berganda didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi

Model		B	T _{hitung}	Sig	T _{tabel}	adj R ²	F _{hitung}	Sig
1	(Constant)	-2,448			1,661	0,814	145,809	0,000
	X1	0,137	3,977	0,000				
	X2	0,341	5,037	0,000				
	X3	0,443	7,052	0,000				

Sumber : Data primer yang diolah (2017)

Berdasarkan hasil pengujian regresi di atas dapat dibentuk sebuah persamaan sebagai berikut:

$$Y = -2,448 + 0,137X_1 + 0,341X_2 + 0,443X_3 + \varepsilon \dots\dots(1)$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *adjusted R Square*. Nilai *adjusted R-Square* dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independent) dalam menerangkan variabel terikat (dependent). Dari tabel 4.16 diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,814. Hal ini berarti bahwa 81,4% Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty*, sisanya sebesar 18,6% (100% - 81,4%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi simultan (Uji F) digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. (Ghozali, 2009). Apabila analisis menggunakan uji F menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikansi terhadap variabel dependen.

Dari uji Anova atau Uji F pada tabel 4.16 di atas, nilai F_{hitung} sebesar 145,809 dengan probabilitas signifikansi yang menunjukkan 0,000. Nilai probabilitas pengujian yang jauh lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty*.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas dalam model regresi berpengaruh secara individu terhadap variabel terikat. Untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan **t_{hitung}** dengan **t_{tabel}** dan nilai signifikansinya dalam penelitian ini menggu-

nakan tingkat signifikansi 0,05. Dalam hal ini, nilai t_{tabel} adalah sebesar 1,661.

Hasil uji parsial (uji t) dalam tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X_1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), yang dapat dilihat dari perbandingan antara t_{tabel} dan t_{hitung} , yakni t_{tabel} lebih kecil dari t_{hitung} , dengan nilai t_{tabel} 1,661 dan t_{hitung} 3,977 serta tingkat signifikansi yang berada di bawah 0,05. Dengan demikian H_{a1} diterima.

Variabel ketegasan sanksi pajak (X_2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), yang dapat dilihat dari perbandingan antara t_{tabel} dan t_{hitung} , yakni t_{tabel} lebih kecil dari t_{hitung} , dengan nilai t_{tabel} 1,661 dan t_{hitung} 5,037 serta tingkat signifikansi yang berada di bawah 0,05. Dengan demikian H_{a2} diterima.

Variabel *tax amnesty* (X_3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), yang dapat dilihat dari perbandingan antara t_{tabel} dan t_{hitung} , yakni t_{tabel} lebih kecil dari t_{hitung} , dengan nilai t_{tabel} 1,661 dan t_{hitung} 7,052 serta tingkat signifikansi yang berada di bawah 0,05. Dengan demikian H_{a3} diterima.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan uji regresi yang dilakukan pada bagian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila Wajib Pajak dapat menerapkan pengetahuan terhadap pajak (menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya) dengan benar dan tepat waktu maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik juga.

Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, bahwa semakin tinggi ketegasan sanksi pajak, maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Itu berarti regulasi tax amnesty yang digulirkan oleh Pemerintah terbukti memberi dampak positif bukan hanya dari segi penerimaan negara saja namun juga mendorong kepatuhan wajib pajak.

Implikasi dari hasil penelitian ini dari ke tiga variabel bebas (independen) yaitu Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi yang menunjukkan pengaruh paling signifikan adalah variabel Tax Amnesty dapat dilihat dari hasil uji signifikansi parameter individual (Uji t) thitung 3,977 untuk variabel Pengetahuan Pajak, thitung 5,037 untuk Sanksi Pajak dan nilai thitung 7,052 untuk Tax Amnesty dari ketiga angka tersebut yang paling tinggi adalah variabel tax amnesty. Ditjen Pajak dapat juga memperluas penerapan tarif pajak yang bersifat final dan memperluas obyek pemungutan dan pemotongan pajak baik PPh maupun PPN dan PPnBM. Kebijakan ini dapat dilaksanakan untuk mengamankan penerimaan Negara, meskipun cenderung kurang adil dan tidak menguntungkan wajib pajak karena hilangnya hak mengkreditkan pajak dan memperhitungkan berbagai biaya usaha dalam menghitung pajak terutang. Dalam kaitan ini, perlu ditingkatkan pula pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan secara intensif, konsisten dan berkesinambungan terutama dimulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi dan pendidikan perpajakan di lingkungan keluarga di rumah. Disamping itu, juga perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan perpajakan agar masyarakat makin sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesina, Olugoke Oladipupo and Uyioghosa, Obazee. 2016. *Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*. iBusiness. Vol. 08 No. 01
- Ahn, J. dan Schneider, B.J., 2000, Cephalometric Appraisal of Posttreatment Vertical Changes in Adult Patients, *Am J Orthod Dentofacial Orthop.*,118:374-84.
- Akromi K. Asbar. 2014. *Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Senapelan Pekanbaru*. JOM FEKON Vol. 1 No. 2 Oktober 2014.
- Aldeya Veronica. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru*. Jom. FEKON Vol. 2 No. 2
- Alm, James. 1998. *Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty*
- Andriani, P.J.A. 2000. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal

YAYASAN AKRAB PEKANBARU

Jurnal AKRAB JUARA

Volume 3 Nomor 2 Edisi Mei 2018 (244-263)

- Akuntansi. Universitas Krisen Petra.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Bayu Caroko. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*. Jurnal. Universitas Brawijaya.
- Bayu Witono. 2008. *Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 7, No. 2
- Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman. 2013. *Manajemen Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung
- Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Christella Pradista Riyana Putri. 2015. *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati Di Kota Yogyakarta*. Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Universitas Kristen Petra. Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1.
- Diana Fitri Septarini. 2015. *Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Merauke*. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Volume VI NO. 1.
- Dias Kusuma Ning Dyah, dkk. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)*. Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB) Vol. 5 No. 1 April
- Diaz Priantara. 2016. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Mitra Wacana Media, Jakarta
- Endah Purnama Sari Eddy dan Verani Carolina. 2015. *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha*. Jurnal Akuntansi Vol.7 No.1
- Faradilla Savitri dan Elva Nuraina. 2017. *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun*. EQUILIBRIUM, Vol. 5, No. 1
- I Gusti Ayu Purnamawati. 2014. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua*. *Pandecta Journal*, Vol. 9, No. 1.